

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN ASURANSI

(Studi Kasus di Kantor Perusahaan Asuransi Jiwasraya Medan dan Kantor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK))

NAMA : SIMON FREDRIK PANJAITAN

NPM : 12.840.0112

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang indenpenden dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Dalam penjelasan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengatur dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, usaha yang menyangkut jasa petanggung atau pengelola resiko, pertanggungulangan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif dan empiris atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dan lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi yang ada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan dengan riset di Kantor Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi yang ada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah dilakukan dengan dua metode yaitu *On-site Supervision* dan *Off-site Supervision*.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perusahaan Asuransi.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF LAW NUMBER 21 IN 2011 IN THE IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS SUPERVISION AND COMPANY INSURANCE

**(Case Study in Medan BNI Life Insurance Company Office and the Office of
Financial Services Authority)**

NAME : SIMON FREDRIK PANJAITAN

NPM : 12.840.0112

FIELD: PRIVAT LAW

Financial Service Authority is an independent institution and free from any intervention of other parties, which has the function, obligation, and regulatory authority in monitoring, examination, and investigation as mentioned in the Law Number 21 in 2011. In the explanation of Law Financial Service Authority, it is stated that an institution of regulatory and supervision of the financial services sector with more integrated and comprehensive is required in order to achieve more effective coordination in handling the problems which arise in the financial system as to ensure the achievement of the stability in financial system. Insurance Company is an insurance company general and life insurance companies, a business related to manage insurance risk, reinsurance risk, marketing and distribution of insurance products. They type of this research is a normative and empirical legal research or collectively, library research and field research which is done with normative juridical approach. The problems raised in this research is to discover the systems used by the Financial Services Authority in supervising Insurance Companies. To adress these problems, the research was done with literature and field research at BNI Insurance Company Office and the Office of the Financial Services Authority. The research results and discussion identifies that the systems used by the Financial Services Authority in supervising Insurance Companies is performed by two methods: On-site and Off-site Supervision.

Keywords : Financial Services Authority, the Insurance Company.